

BAB II

LANDASAN TEORI

A. KONSEP SEKOLAH BERWAWASAN LINGKUNGAN (ADIWIYATA)

1. Pengertian Kebijakan Pendidikan

Sering kita mendengar istilah Kebijakan ditulis maupun diucapkan. Istilah Kebijakan sering ditemui dalam lingkungan di pemerintahan, politik, dan pendidikan. HM Hasbullah menuliskan bahwa asal kata Kebijakan dari kata “*policy*” yang mempunyai arti menyelesaikan permasalahan atau kepentingan yang bersifat umum, atau berarti juga administrasi dalam pemerintahan¹.

Istilah (*Policy*) sering rancu dengan istilah kebijaksanaan (*wisdom*)². Keduanya memiliki arti yang berbeda . Kebijakan dalam prosesnya dilandasi oleh sebuah pemikiran atau pertimbangan akal, yang merupakan dasar pertimbangan dalam penentuan keputusan dari berbagai sudut pandang yang dijadikan acuan dalam penentuan suatu kebijakan. Sedangkan Kebijaksanaan dalam proses penentuannya lebih didasarkan pada kondisi emosional.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dalam garis besarnya mengartikan bahwa kebijakan sebagai adalah suatu kepandaian , bentuk kemahiran, refleksi kebijaksanaan, yang merupakan rangkaian konsep dan

¹H.M. Hasbullah, *Kebijakan Pendidikan* (Dalam perspektif Teori, Aplikasi, dan Kondisi Objektif Pendidikan di Indonesia) ,(Jakarta: Rajawali Pers, 2015) hlm. 37

²Riant Nugroho dan H.A.R Tilaar , *Kebijakan Pendidikan (Pengantar Untuk Memahami Kebijakan Pendidikan dan kebijakan Pendidikan Sebagai Kebijakan Publik)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 16

Dasar yang menjadi garis haluan dan dasar rencana dalam melaksanakan suatu pekerjaan, bentuk dari kepemimpinan dan cara bersikap dan bertindak yang dilakukan oleh pemerintah, lembaga atau organisasi dan sebagainya sebagai bentuk pernyataan cita-cita, prinsip atau dimaksudkan sebagai pedoman manajemen pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.

Berikut ini adalah beberapa pengertian kebijakan yang dikemukakan oleh beberapa ahli:

- a. M. Hasbullah mengutip pendapat Eulau dan Prewitt, mengatakan bahwa kebijakan merupakan keputusan tetap yang bercirikan adanya konsistensi dan merupakan pengulangan perbuatan dari pihak-pihak yang membuat dan dari mereka yang mematuhi keputusan kebijakan tersebut.

Kebijakan yang sudah dibuat menuntut konsistensi dari para pelaku dan objek kebijakan dalam implementasinya sehingga berbuah pada efektivitas suatu kebijakan³.

- b. Mudjia Rahardjo mengambil pendapat Duke dan Canady yang menggabungkan delapan konsep pengertian kebijakan, yaitu:
 - 1) Kebijakan sebagai penegasan maksud dan tujuan yang ingin dicapai.
 - 2) Kebijakan sebagai kumpulan dari beberapa keputusan lembaga yang mempunyai tujuan untuk mengatur, mengendalikan,

³H.M. Hasbullah, *Kebijakan Pendidikan (Dalam perspektif Teori, Aplikasi, dan Kondisi Objektif Pendidikan di Indonesia)*. hlm. 38

memperkenalkan, melayani pengaruh dalam lingkungan yang menjadi wewenangnya.

- 3) Kebijakan sebagai panduan atau tuntunan untuk tindakan yang diskresional.
- 4) Kebijakan sebagai suatu strategi atau cara yang digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan.
- 5) Kebijakan adalah bentuk perilaku yang mempunyai sanksi.
- 6) Kebijakan sebagai bentuk konsistensi dan keteraturan norma perilaku dalam beberapa bentuk tindakan atau perilaku substantif.
- 7) Kebijakan sebagai output bentuk refleksi dari pembuat kebijakan.
- 8) Kebijakan sebagai bentuk seberapa besar pembuat kebijakan berpengaruh dalam pemahaman objek terhadap penerapan suatu sistem. sistem⁴.

Koontz dan O'Donell berpendapat bahwa kebijakan merupakan pernyataan atau pemahaman yang bersifat umum yang menyatakan bahwa kebijakan itu sebagai suatu bentuk pernyataan atau pemahaman yang bersifat umum yang menjadi pedoman pemikiran untuk membuat keputusan yang esensi batasan tertentu dalam pembuatan keputusan⁵.

Kontek pembahasan kebijakan dalam hal ini adalah kebijakan pendidikan. Pendidikan adalah tahapan-tahapan yang akan terus berlanjut

⁴Mudjia Rahardjo, *Pemikiran Kebijakan Pendidikan Kontemporer* (Malang : UIN Maliki Press, 2010), hlm.3.

⁵Syaiful Syagala, *Administrasi Pendidikan Kontemporer*, .. hlm.97.

tanpa akhir yang akan diupayakan oleh siapapun. Dalam hal inipun negara telah menjamin pendidikan bagi seluruh penduduk Indonesia.

Dilihat dari pengertian sempitnya pendidikan adalah sekolah. Pendidikan merupakan pengajaran yang dikelola dan diselenggarakan oleh lembaga yang bernama sekolah. Sekolah adalah tempat dimana pendidikan itu dilakukan. Anak dan remaja usia sekolah diserahkan kepada pihak sekolah dengan tujuan dan agar pihak sekolah memberikan bekal untuk nantinya terjun ke masyarakat. Yang artinya untuk siap siswa tidak hanya diberikan kemampuan kognitif tetapi juga harus dibekali mental yang matang, kesadaran untuk tumbuh berkembang, mampu bersosial dan mampu diberi tanggung jawab.

Selain teori diatas kebijakan pun dapat di definisikan sesuai dengan teori yang mengikutinya, antara lain yaitu:

- a) Teori Kelembagaan menilai kebijakan sebagai sebuah aktivitas kelembagaan yang mana struktur serta lembaga pemerintah merupakan pusat kegiatan politik.
- b) Teori Kelompok yang memandang kebijakan sebagai keseimbangan kelompok yang tercapai dalam perjuangan kelompok pada suatu saat tertentu. Kebijakan pemerintah juga dapat dipandang sebagai nilai-nilai kelompok elit yang sedang memerintah.
- c) Teori Elit menilai bahwa Kebijakan pemerintah sebagai nilai-nilai kelompok elit yang memerintah.

- d) Teori Rasional menilai bahwa kebijakan sebagai pencapaian tujuan secara efisien melalui sistem pengambilan sebuah keputusan yang tetap.
- e) Teori Inkremental, kebijakan dipandang sebagai variasi terhadap kebijakan masa lampau atau dengan kata lain kebijakan pemerintah yang ada sekarang ini merupakan kelanjutan kebijakan pemerintah pada waktu yang lalu yang disertai modifikasi secara bertahap.
- f) Teori Permainan menilai bahwa kebijakan sebagai pilihan yang rasional dalam beberapa situasi-situasi yang saling bersaing.
- g) Teori kebijakan lainnya adalah Teori Campuran dimana merupakan gabungan model teori rasional komprehensif dan teori inkremental.

Bagi generasi muda, untuk membentuk dan menumbuhkan karakter yang mempunyai kepedulian terhadap lingkungan hidup, sekolah adalah tempat yang paling ideal. Karena sekolah merupakan tempat bermuaranya multi pengetahuan yang akan menjadi pintu terbentuknya intelektual lahir dan batin bagi siswa. Disinilah perlunya dibuat kebijakan untuk mengakomodir kepentingan sekolah agar bisa menjalankan fungsinya sebagai tempat untuk menuntut ilmu.

Kebijakan Sekolah adalah serangkaian norma atau aturan yang dibuat oleh pimpinan sekolah bersama dengan perangkat sekolah lainnya (*stakeholder*). Sekolah sebagai wakil dari pemerintah untuk mewujudkan sebuah sistem pendidikan untuk mencapai tujuan dan cita-cita bersama. Ini merupakan suatu bentuk keberpihakan pemerintah untuk mendukung dan mewujudkan program sekolah yang berwawasan lingkungan hidup.

Sekolah tidak bisa menjalankan kebijakan jika tidak didukung oleh semua elemen yang ada disekolah. Kerjasama antara semua elemen sangat diperlukan untuk menjamin bahwa kebijakan yang dibuat dapat dilaksanakan dengan baik dengan hasil yang memuaskan.

2. Proses Pembuatan Kebijakan

Kebijakan yang baik adalah kebijakan yang dibuat berdasarkan fakta yang muncul dilapangan yang perlu untuk ditindaklanjuti, dan diselesaikan yang dibuat berdasarkan usulan, ide gagasan yang mempunyai keberpihakan kepada kepentingan masyarakat dan kenyataan yang dijumpai, menanggapi berbagai kepentingan yang ada serta meminimalkan dampak kerugian bagi pihak tertentu.

Kebijakan pendidikan yang dibuat haruslah memperhitungkan berbagai aspek seperti kondisi politik, sosial, ekonomi, dan faktor-faktor lainnya yang dimungkinkan akan memberikan pengaruh pada pendidikan. Banyak kepentingan publik yang mempunyai dampak sangat besar akan ditentukan oleh kebijakan pendidikan. Hal ini karena sekolah dan pendidikan merupakan bentuk sistem yang keberadaannya bukan hanya dirasakan oleh penghuni sekolah saja, akan tetapi dirasakan juga oleh masyarakat.

Dalam bukunya yang berjudul “*Administrasi Pendidikan Kontemporer*” Syaiful Syagala menuliskan bahwa secara umum bentuk

pendekatan yang digunakan untuk membuat kebijakan adalah sebagai berikut⁶.

a. Pendekatan Empirik (*Empirical Approach*)

Penekanan pendekatan secara empirik adalah pada penjelasan bagaimana sebab dan akibat itu akan timbul dari suatu kebijakan yang dibuat dalam dunia pendidikan yang bersifat faktual. Dan informasi yang dihasilkan akan bersifat deskriptif dan prediktif. Dengan pendekatan secara empirik diharapkan akan mampu menghasilkan informasi yang penting tentang nilai-nilai, fakta-fakta dan tindakan yang diambil dalam sistem pendidikan.

b. Pendekatan Evaluatif (*Evaluatif Approach*)

Sebagaimana dikutip oleh Syaiful Syagala, pendekatan evaluatif adalah satu aktivitas yang dimaksudkan untuk sejauh mana suatu kegiatan itu bisa dilaksanakan atau tidak, dengan hasil yang diharapkan atau tidak. Dalam pendekatan evaluatif terutama adalah penentuan bobot atau nilai. Hasil pada tahap evaluasi kebijakan akan memberikan gambaran dan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang bersifat evaluatif. Yaitu nilai dari suatu kebijakan.

Dalam upaya menghasilkan kebijakan yang benar-benar bijak untuk semua unsur, tidaklah mudah. Karena dalam kebijakan ada banyak faktor yang harus dipertimbangkan dan diadopsi kepentingannya, supaya kebijakan yang dibuat tidak menimbulkan permasalahan baru. Untuk

⁶Ibid., hlm.99.

menghasilkan kebijakan yang bijak ada beberapa tahapan yang biasanya akan dilakukan.

Policy making process adalah tahapan-tahapan dalam proses pembuatan kebijakan. Yang dinyatakan atau divisualisasikan rangkaian tahapan yang saling bersinergi dan saling tergantung satu dengan lainnya dan tahapannya teratur dalam urutan waktu yang telah ditentukan. Seperti penyusunan agenda, rumusan kebijakan, penyerapan/adopsi, implementasi/pelaksanaan kebijakan, dan penilaian kebijakan. Kebijakan akan mudah untuk dipahami, dilaksanakan dan dikaji setiap tahapnya apabila dijabarkan dan diilustrasikan dalam bentuk kalimat yang mudah dipahami bagi siapa saja dan mempunyai keseragaman persepsi dari semua kalangan .

Kebijakan dibuat melalui tahap-tahap sebagai berikut:

a. Menyusun Agenda (*Agenda Setting*)

Menyusun agenda kebijakan merupakan tahap pertama yang sangat penting dalam pembuatan kebijakan. Tahap ini merupakan kunci untuk tahap selanjutnya. Tahap penyusunan agenda harus dijalani sebelum pembahasan rancangan kebijakan.

Penyusunan agenda kebijakan semestinya dilakukan berdasarkan tingkat urgensi dan esensi dari sebuah kebijakan, juga keterlibatan stakeholder yang terkait. Dimana sebuah kebijakan tidak boleh mengabaikan tingkat urgensi, esensi, dan keterlibatan stakeholder.

Fase penyusunan agenda merupakan fase yang sangat strategis untuk menentukan suatu kebijakan publik yang realitas dan ideal. Diharapkan nantinya akan menghasilkan produk kebijakan yang sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Pada fase ini pembuat kebijakan akan memiliki kesempatan untuk memahami dan mengintrepassikan masalah yang terjadi. Pemimpin menyiapkan sebuah rancangan undang-undang yang akan dimusyawarahkan , di sikapi dan akan diputuskan dalam musyawarah, untuk dijadikan arah langkah proses atau fase berikutnya⁷.

b. Susunan atau Formulasi Kebijakan

Permasalahan yang muncul dan telah dimasukkan dalam agenda kebijakan selanjutnya akan dilakukan pembahasan oleh tim pembuat kebijakan. Permasalahan tadi kemudian dipilah dan dikategorikan untuk memudahkan dan memberi alur terhadap proses pemecahan masalah. Berbagai alternatif dan kemungkinan-kemungkinan merupakan dasar pertimbangan untuk dijadikan pilihan penyelesaian permasalahan.

Pada tahapan ini merupakan mekanisme pemecahan masalah yang telah masuk dalam tahapan penyusunan agenda. Pada tahapan formulasi kebijakan tindakan lebih bersifat teknis dibaningkan dengan tahapan penyusunan agenda. Pada penyusunan agenda lebih bersifat

⁷Fatkuroji, *Analisis Implementasi Kebijakan Pembelajaran terpadu Terhadap Minat Konsumen Pendidikan (Studi SDIT Bina Amal dan SD AlAzhar Banyumanik Semarang)*, (Semarang: Walisongo Press, 2012) hlm. 24

politis karena hasilnya memerlukan kompromi antara personal tim pembuat kebijakan. Teknik analisis memegang peranan penting dalam formulasi kebijakan, karena dengan berbagai teknis yang baik akan menghasilkan keputusan yang baik juga. Teori-teori pengambilan keputusan menjadi bagian analisis yang sangat berguna untuk meminimalisir resiko kegagalan.

Kriteria-kriteria yang harus diperhatikan untuk menghasilkan kebijakan yang baik, yaitu : (1) Rumusan kebijakan bersifat publik artinya tidak hanya menciptakan lingkungan tertentu saja dan tidak juga mendiktekan keputusan yang bersifat spesifik, (2) Rumusan kebijakan bersifat fleksibel yang artinya berlaku secara kontinyu dalam menghadapi segala situasi atau permasalahan yang muncul secara berulang, (3) Rumusan kebijakan harus dapat dipahami dan diterapkan oleh berbagai elemen di mana kebijakan itu akan diterapkan.

c. Adopsi/ Legitimasi Kebijakan

Legitimasi adalah tahapan penting yang akan mempengaruhi terhadap khalayak, baik itu khalayak yang mendapatkan keuntungan atau khalayak yang merasa dirugikan akibat kebijakan yang dibuat. Legitimasi merupakan senjata yang akan menjadi tameng untuk menjamin kelancaran pelaksanaan kebijakan. Dengan adanya legitimasi, kedudukan suatu kebijakan akan menjadi kuat dan mempunyai kekuatan untuk “memaksa”, kekuatan untuk tetap diakui

keberadaannya, sehingga seluruh elemen yang berada dimana kebijakan itu diterapkan mempunyai kewajiban untuk mematuhi, mentaati dan menjalankannya dengan baik dan benar tanpa ada pengecualian⁸.

Indikasi dari apakah suatu kebijakan diterima dan didukung oleh masyarakat adalah dari seberapa besar partisipasi aktif masyarakat dalam pelaksanaannya, artinya semakin banyak masyarakat yang berpartisipasi berarti kebijakan itu dapat diterima oleh masyarakat, dan ini memaknai bahwa kebijakan itu dimata masyarakat adalah baik dan diyakini akan memberikan manfaat.

Pengabsahan dan otorisasi merupakan bentuk dari pengakuan masyarakat terhadap suatu kebijakan. Pengabsahan adalah suatu proses terhadap kebijakan pendidikan yang telah dibuat untuk diabsahkan. Sedangkan otorisasi adalah pemberian wewenang untuk memberlakukan kebijakan pendidikan yang telah dibuat. Otorisasi atau kewenangan inilah yang nantinya akan memberikan tanggung jawab bagi semua pihak untuk melaksanakannya yang Dari otorisasi atau kewenangan inilah maka muncul tanggung jawab untuk melaksanakan. Sehingga siapapun yang diberi kewenanga untuk melaksanakannya nantinya akan dimintai pertanggungjawaban terhadap hasil dari pelaksanaan kewenangan yang diamanatkan

⁸Pierre Larousse *Petit Larousse: dictionnaire encyclopedique pour tous*, Librairie Larousse (1962)

kepadanya. Dapat diambil kesimpulan bahwa legitimasi mempunyai tujuan untuk memberikan kewenangan bagi para pelaksana untuk menjalankan kebijakan sesuai dengan formulasi kebijakan yang telah ditetapkan.

3. Implementasi Kebijakan

Pada tahapan pelaksanaan/implementasi kebijakan merupakan tolak ukur keberhasilan kebijakan pendidikan yang telah dibuat. Pada proses ini menjadi sangat penting untuk dicermati karena pada proses ini sangat menentukan. Sebaik apapun produk kebijakan pendidikan dibuat dan dirumuskan tidak akan berarti apa apa tanpa adanya implementasi di lapangan, karena kemanfaatan dari kebijakan tersebut tidak akan terlihat dan tidak dapat dirasakan.

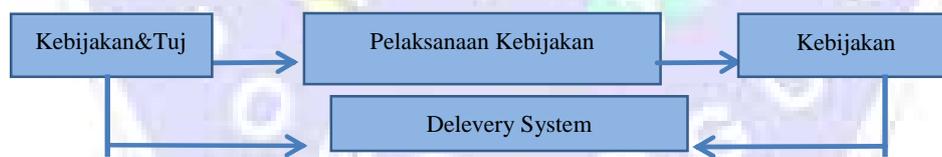
Pelaksanaan atau implementasi kebijakan pendidikan adalah suatu proses yang tidak saja menyangkut tindakan badan administratif yang telah diberi kewenangan untuk melaksanakan program kebijakan dan menciptakan pemahaman terhadap sasaran kebijakan untuk mentaati dan menjalankan, akan tetapi lebih jauh lagi juga menyangkut faktor-faktor hukum, ekonomi, politik, dan sosial yang secara langsung atau tidak langsung akan mempengaruhi pandangan dan perilaku pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program kebijakan.

Untuk menjamin sukses dan lancarnya implementasi kebijakan pendidikan, maka analisi tentang peraturan, financial, sumber daya manusia, dan prasarana lainnya perlu untuk dilaksanakan. Dengan

demikian semua factor yang mempengaruhi dapat dimaksimalkan untuk mendukung pelaksanaan program sehingga hasil yang maksimal pun akan dicapai. Bukan justru kebalikannya, factor yang mempengaruhi menjadi salah satu sebab kegagalan pelaksanaan program kebijakan pendidikan.

Indikator untuk mengukur/menilai keberhasilan pelaksanaan kebijakan adalah terjadinya kesesuaian pelaksanaan di lapangan dengan pola kebijakan, tujuan dan ketepatan sasaran syang telah ditetapkan. Sebaliknya, apabila ditemukan ketidaksesuaian pelaksanaan kebijakan dengan rumusan atau pola yang telah ditetapkan, dapat dikatakan bahwa kebijakan tersebut tidak berhasil.

Secara nyata untuk menilai keberhasilan sebuah kebijakan adalah munculnya dampak positif bagi pemecahan permasalahan yang sedang terjadi. Model implementasi kebijakan secara sistematis dapat dilihat pada bagan berikut⁹:



Gambar . 2. 1. Bagan Implementasi Kebijakan

Proses pelaksanaan kebijakan diawali dengan penetapan tujuan dan sasaran yang diinginkan. Selanjutnya adalah tahap pelaksanaan kebijakan, yang di dalamnya tidak saja menyangkut perilaku badan

⁹H.M. Hasbullah, *Kebijakan Pendidikan (Dalam perspektif Teori,Aplikasi, dan Kondisi Objektif Pendidikan di Indonesia)*.. hlm. 94

administratif sebagai penanggung jawab program, akan tetapi juga semua sasaran yang masuk dalam ranah pelaksanaan program.

Tahap selanjutnya adalah implementasi kebijakan. Parameter kesuksesan implementasi kebijakan adalah adanya kesesuaian antara rumusan kebijakn yang telah dibuat dengan pelaksanaannya di lapangan, baik itu menyangkut tujuan maupun sasaran yang sebelumnya telah ditentukan. Kesuksesan implementasi kebijakan memerlukan kerjasama antara semua elemen yang terlibat di dalamnya tanpa kecuali. Serta kesadaran untuk berkomitmen mendukung bagi pelaksanaan program kebijakan.

Mengingat hal tersebut di atas diperlukan suatu sistem yang terarah, terukur dan bisa dilaksnakan oleh semua elemen. Apabila dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan rumusan yang telah ditetapkan dan disepakati, maka akan terjadi kegagalan kebijakan.

4. Monitoring Dan Evaluasi Kebijakan

Monitoring dan evaluasi adalah dua proses yang saling beriringan, yang pelaksanaannya sangat diperlukan. Monitoring terhadap program kebijakan berguna untuk memantau pelaksanaan kebijakan dijalankan dan ditaati oleh baik bagian administratif sebagai penanggung jawab pelaksana maupun oleh pelaku sasaran . Monitoring berguna untuk mengecek kesesuaian pelaksanaan kebijakan dengan rencana yang telah ditetapkan, apakah sesuai atau tidak. Pemantauan juga dilakukan terhadap

kemajuan/perkembangan implementasi kebijakan yang mencakup tahapan pemrograman, kegiatan maupun proyek yang sedang dijalankan.

Tahapan ini sangat penting, karena dari tahapan inilah akan diketahui sejauh mana Kebijakan dilaksanakan, dengan hasil seperti apa, dan kendala-kendala di lapangan. Dari hasil monitoring akan diperoleh bahan sebagai langkah untuk melakukan evaluasi.

M. Hasbullah dalam bukunya yang berjudul Kebijakan Pendidikan, menerangkan bahwa fungsi monitoring adalah sebagai berikut:

a. *Compliance* (Ketaatan)

Bahwa monitoring berguna untuk mengetahui apakah semua elemen yang terlibat baik itu administrator, staff dan elemen pelaksana lainnya sudah mengikuti dan menjalankan prosedur yang telah ditentukan apakah tindakan administrator, staf, dan semua komponen ditetapkan dengan baik dan benar.

b. *Auditing* (Pemeriksaan)

Dengan fungsi sebagai pemeriksaan akan diketahui apakah sumber dan layanan untuk mencapai target bersama telah tepat sasaran atau belum.

c. *Accounting* (Laporan)

Monitoring akan memberikan informasi untuk menghitung dan menentukan besaran efek pelaksanaan program kebijakan terhadap perubahan social dan masyarakat yang diukur dalam periode waktu tertentu secara kontinyu.

d. *Explanation* (Penjelasan)

Fungsi monitoring yang terakhir adalah sebagai “penjelas” yang berguna memberikan informasi untuk menerangkan bagaimana akibat yang ditimbulkan oleh program kebijakan dan apabila terjadi ketidakcocokan antara perencanaan dan pelaksanaan dapat dijelaskan secara jelas dan menyeluruh¹⁰.

Tahapan yang mengiringi pelaksanaan monitoring adalah evaluasi terhadap program kebijakan. Richard Gorton dan Schneider menuliskan “*evaluation can be defined as the process of examining as carefully, thoroughly, and objectively as possible an individual, group, product, or program to ascertain weak and strenght*” yang artinya evaluasi dapat didefinisikan sebagai proses menilai secara hati-hati/teliti, menyeluruh, dan objektif baik secara individu atau kelompok untuk mengetahui kelebihan dan kelemahan dari suatu program.

Hal yang dititik beratkan atau menjadi fokus penilaian adalah apakah perencanaan kebijakan yang sudah ditetapkan dilaksanakan secara menyeluruh dalam implementasi kebijakan atau belum.

Apabila implementasi belum sesuai dengan perencanaan, tujuan maupun sasarannya berarti perlu untuk segera diambil langkah selanjutnya untuk menghentikan program dan membuat kebijakan baru atau cukup dilakukan revisi.

¹⁰Ibid., hlm. 113.

Dengan hasil penialaian evaluasi akan dijadikan bahan masukan untuk membuat rumusan kebijakan-kebijakan selanjutnya. Evaluasi dilakukan terhadap keseluruhan tahapan/proses mulai dari awal sampai dengan hasil akhirnya. Karena sejauh mana tahapan/proses dijalankan akan mempengaruhi hasil akhir. Ini artinya proses evaluasi dilakukan bukan pada akhir program namun dimulai sejak tahapan-tahapan awal program, untuk memastikan hasil akhir yang dicapai merupakan hasil pelaksanaan tahapan secara menyeluruh.

B. IMPLEMENTASI SEKOLAH BERWAWASAN LINGKUNGAN (ADIWIYATA)

1. Pengertian Pendidikan Berbasis Lingkungan (Adiwiyata)

Rancangan awal program Adiwiyata adalah program yang dirancang untuk menanamkan kepada elemen di sekolah bahwa menjaga keseimbangan lingkungan itu sangat penting demi kelestarian ekosistem di sekitar kita. Penekanan program Adiwiyata yaitu pada pembentukan dan pembangunan karakter warga sekolah agar mempunyai pemahaman dan kesadaran untuk berperan aktif menjaga keseimbangan lingkungan, mengelola lingkungan dan melindungi lingkungan.

Program Adiwiyata adalah salah satu program Kementerian Lingkungan Hidup yang merupakan implementasi Permen Lingkungan Hidup No. 02 tahun 2009. Program ini merupakan suatu bentuk

penghargaan yang diberikan oleh pemerintah kepada lembaga pendidikan formal yang dinilai berjasa dalam mengembangkan pendidikan lingkungan hidup.

Kata Adiwiyata berasal dari kata Sansekerta yaitu “**Adi**” bermakna: besar, agung, baik, sempurna. sedangkan “**Wiyata**” bermakna tempat di mana seseorang dapat memperoleh ilmu pengetahuan serta norma. Jadi pengertian wiyata adalah tempat yang baik dan ideal dimana seseorang dapat memperoleh segala ilmu pengetahuan dan berbagai norma serta etika yang dapat dijadikan dasar manusia menuju terciptanya kesejahteraan hidup menuju cita-cita pembangunan berkelanjutan. Adiwiyata dicanangkan untuk mendorong dan membentuk sekolah-sekolah di Indonesia agar dapat turut melaksanakan upaya pemerintah menuju pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan bagi kepentingan generasi sekarang maupun yang akan datang¹¹.

Tujuan program Adiwiyata adalah untuk menumbuhkan dan membentuk seluruh warga sekolah yang mempunyai rasa tanggung jawab melindungi dan mengelola lingkungan hidup dengan membuat tata pengelolaan sekolah yang baik dan ramah lingkungan. Dengan demikian diharapkan sekolah menjadi tempat yang nyaman dan ideal untuk mendapatkan dan mempelajari ilmu pengetahuan guna mewujudkan kehidupan yang sejahtera.

¹¹E-Journal : Tri Rismawati, *Efektivitas Program Adiwiyata Sebagai Upaya Menanamkan Rasa cinta Lingkungan di SMP Negeri 3 Malang*, (Malang: Universitas Negeri Malang, 2013) hlm,15.

Prinsip dasar pelaksanaan Adiwiyata sebagai berikut ini;

- a. Partisipatif yaitu Warga sekolah merupakan pelaku yang terlibat dalam manajemen sekolah yang meliputi keseluruhan proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi sesuai tanggungjawab dan peran masing masing. Keterlibatan warga sekolah tanpa kecuali dalam implementasi program Adiwiyata menjadi poin penting guna mensukseskan program tersebut. Warga sekolah dalam hal ini adalah seluruh komponen sekolah yang meliputi kepala sekolah, guru, pegawai, karyawan bahkan karyawan kantin pun dituntut berperan aktif dalam menciptakan budaya peduli terhadap lingkungan.
- b. Berkelanjutan Artinya dalam pelaksanaan program Adiwiyata harus didasarkan pada proses manajemen yang baik dan berkelanjutan. Baik itu dari segi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi. Seluruh kegiatan harus dilakukan secara terencana dan berkelanjutan. Untuk memastikan bahwa program dapat berlanjut perlu adanya monitoring dan evaluasi . Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan dari setiap tahap/proses yang dijalankan. Dengan dilakukannya monitoring dan evaluasi akan diperoleh gambaran penilaian mengenai pelaksanaan program Adiwiyata, dan diharapkan muncul masukan dan saran untuk perbaikan kelanjutan program kedepannya.

Dengan melaksanakan program Adiwiyata, akan memperoleh keuntungan sebagai berikut:

1. Merupakan salah satu elemen yang dapat digunakan untuk mendukung perolehan standar kompetensi/kompetensi dasar dan standar kompetensi lulusan (SKL) pada pendidikan tingkat dasar dan menengah.
2. Efisiensi penggunaan dan penyerapan dana operasional sekolah dengan pengurangan dan penghematan konsumsi berbagai sumber daya an energi Misalnya pemakain listrik, AC.
3. Menumbuhkan suasana yang harmonis dan rasa kebersamaan yang tinggi di antara warga sekolah serta suasana belajar mengajar yang lebih nyaman, tertata dan kondusif.
4. Menjadi media untuk melakukan proses pembelajaran dan pengajaran serta menumbuhkan nilai-nilai kepedulian untuk memelihara serta mengelola lingkungan sekitar agar tercipta lingkungan hidup yang nyaman bagi warga sekolah dan masyarakat yang berada di sekitar sekolah.
5. Menciptakan dan meningkatkan usaha nyata dalam upaya melindungi dan mengelola kelestarian lingkungan dengan melakukan pengendalian terhadap kerusakan, pencemaran, serta pelestarian lingkungan bagi sekolah.

Upaya untuk mewujudkan sekolah Adiwiyata melalui empat komponen program, yaitu: Kebijakan yang berwawasan lingkungan, pembuatan dan pelaksanaan kurikulum berbasis lingkungan, kegiatan

lingkungan berbasis partisipatif, dan pengelolaan sarana pendukung ramah lingkungan¹².

2. Kebijakan Berwawasan Lingkungan

Dalam upaya untuk menciptakan dan mewujudkan sekolah Adiwiyata, sekolah mempunyai tanggung jawab untuk membuat, mengembangkan dan melaksanakan kebijakan yang berbasis lingkungan hidup. Dengan merujuk pada buku yang telah diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup yaitu pedoman Adiwiyata. Di dalamnya termuat indikator-indikator yang menjadi standar penilaian baik dari segi implementasi kurikulum, prasarana pendukung ramah lingkungan, dan kegiatan partisipatif.

Buku panduan Adiwiyata yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup pada tahun 2013 menyebutkan beberapa indikator yang menjadi rujukan dalam pengembangan kebijakan sekolah yang berwawasan lingkungan guna terciptanya lingkungan sekolah yang nyaman atau terwujudnya sekolah Adiwiyata. Indikator yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Penetapan visi, misi, dan tujuan sekolah yang dituangkan dalam kurikulum yang di dalamnya memuat kebijakan untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup .

¹²E-book: Anonimous, Panduan Adiwiyata Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan 2013, (Jakarta: Kementrian Lingkungan Hidup, 2013),hlm. 16.

- b. Dalam kurikulumnya mempunyai struktur pelajaran wajib, muatan lokal, pengembangan diri terkait kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- c. Mata pelajaran wajib dan/ mulok yang terkait PLH (pendidikan lingkungan hidup) yang dilengkapi dengan ketuntasan minimal belajar.
- d. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) mencantumkan upaya untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, meliputi; kesiswaan, kurikulum dan kegiatan pembelajaran, peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan.
- e. Tersedia dan tercukupinya sarana dan prasarana, budaya dan lingkungan sekolah, peran serta masyarakat dan kemitraan, peningkatan pengembangan mutu¹³.

3. Implementasi Kurikulum Berwawasan Lingkungan

Mngutip pendapat Hamalik, Mohammad Mustari dalam karya bukunya yang berjudul “Manajemen Pendidikan” menyatakan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan yang di dalamnya memuat tujuan, isi dan bahan pelajaran serta tata cara yang dipergunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu¹⁴.

¹³Ibid., hlm 22.

¹⁴Mohammad Mustari, *Manajemen Pendidikan*, (Jakarta: Rajawali Press, 2014),hlm 53.

Don Mills menyatakan, “ *a curriculum is a plan for learning consisting of two major dimensions, vision, and structure*¹⁵, yang berarti kurikulum adalah rencana untuk pembelajaran yang terdiri dari dua dimensi utama, visi dan struktur.

Penerapan kurikulum yang berbasis lingkungan merupakan salah satu komponen terpenting yang bersentuhan langsung dengan keseharian siswa untuk mewujudkan sekolah Adiwiyata. baik, baik dari sisi perencanaan kurikulum, pengorganisasiannya, implementasinya, pengendalian, dan evaluasi kurikulumnya.

Adanya kurikulum akan memberi arah yang jelas dan terfokus pada sasaran dan tujuan yang ingin dicapai dalam pembelajaran. Pada pelaksanaan kurikulum yang berwawasan lingkungan harus disiapkan terlebih dahulu manajemen kurikulum yang terkelola dengan baik

Keberhasilan sekolah dalam menerapkan kurikulum, tergantung kepada guru. Guru memegang peranan yang sangat penting sebagai kunci penggerak komponen di sekolah. Karena guru bersentuhan langsung dengan warga sekolah dalam hal ini siswa. Guru dituntut untuk mempunyai kemampuan mengembangkan rencana pelaksanaan pembelajaran serta mengembangkan strategi pembelajaran yang tepat sehingga mampu mengangkat dan mempopulerkan tema lingkungan hidup dalam pembelajarannya.

¹⁵Don Mills, *Curriculum*, (New York: Macmillan Publishing Company, 1989), hlm 3.

Tugas guru tidak hanya sekedar Transfer of knowledge tetapi juga *transfer of value*. Guru harus mampu bertindak sebagai motivator, mediator dan fasilitator.

Indikator pelaksanaan kurikulum berwawasan lingkungan dijelaskan dalam buku pedoman Adiwiyata adalah sebagai berikut;

- a. Menerapkan pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang melibatkan peserta didik secara aktif dalam proses pembelajaran
- b. Membawakan dan mengembangkan isu-isu lingkungan hidup yang terjadi di daerah lokal maupun global sebagai bahan materi untuk pembelajaran lingkungan hidup sesuai dengan jenjang pendidikan
- c. Mengembangkan penilaian pembelajaran dengan menggunakan indikator dan instrumen pembelajaran lingkungan hidup
- d. Membuat dan mengembangkan rancangan pembelajaran yang lengkap, untuk proses kegiatan belajar mengajar di kelas, laboratorium, maupun diluar kelas
- e. Melibatkan orang tua siswa dan masyarakat sekitar dalam program pembelajaran
- f. Menyampaikan dan mempublikasikan hasil inovasi pembelajaran lingkungan hidup, sehingga warga sekolah dan masyarakat menjadi semakin tahu
- g. Mengkaitkan dan mensinergikan pengetahuan konseptual dan procedural dalam pemecahan permasalahan lingkungan hidup, serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari

- h. Mendorong untuk menghasilkan karya nyata yang berkaitan dengan fungsi pelestarian lingkungan hidup dan pencegahan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
- i. Menerapkan pengetahuan yang diperoleh tentang lingkungan hidup sebagai petunjuk atau materi untuk mengatasi permasalahan lingkungan hidup yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari
- j. Mempublikasikan hasil yang diperoleh dalam pembelajaran lingkungan hidup dengan menggunakan berbagai media dan cara¹⁶.

4. Kegiatan Lingkungan Berbasis Partisipatif

Pelaksanaan program Adiwiyata memerlukan keterlibatan semua pihak yang berada dalam lingkungan sekolah, kebersamaan dan kesamaan persepsi antara warga sekolah menjadi sangat penting. Hal ini dikarenakan program Adiwiyata bukan program yang ditujukan untuk beberapa personel sekolah, atau merupakan tanggung jawab segelintir orang dalam lingkungan sekolah atau program khusus untuk mata pelajaran tertentu.

Dengan demikian tugas dan tanggung jawab pelaksanaan program Adiwiyata dipikul oleh setiap warga sekolah tanpa kecuali. Oleh sebab itu program kebijakan Adiwiyata harus disosialisasikan kepada seluruh stakeholder dan warga sekolah, agar semua memiliki persepsi dan pemahaman yang sama sehingga implementasinya bisa berjalan maksimal.

¹⁶E-book: Anonymous, *Panduan Adiwiyata Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan 2013*, hlm 24.

Sebagaimana disebutkan dalam buku panduan Adiwiyata 2013 yang menyebutkan indikator kegiatan lingkungan yang berbasis partisipatif untuk mewujudkan sekolah Adiwiyata adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan pemeliharaan dan perawatan gedung dan lingkungan di sekolah yang dilakukan oleh semua warga sekolah
- b. Menggunakan dan memanfaatkan lahan dan fasilitas yang berada dalam lingkungan sekolah sesuai dengan aturan dan norma perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
- c. Kegiatan ekstras kurikuler yang mendukung perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup lebih dikembangkan dan dipopulerkan
- d. Warga sekolah mempunyai kreatifitas dan inovasi untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup
- e. Menjalin kerjasama dengan pihak luar dalam kegiatan lingkungan hidup di sekolah, misalnya Dinas atau instansi terkait
- f. Keberadaan narasumber dapat dimanfaatkan untuk lebih meningkatkan proses pembelajaran lingkungan hidup
- g. Dukungan dari kalangan yang terkait dengan sekolah, seperti orang tua, alumni, media, dunia usaha, pemerintah, LSM, perguruan tinggi serta sekolah lain dalam upaya meningkatkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
- h. Meningkatkan peran komite sekolah dalam membangun kemitraan untuk pembelajaran lingkungan hidup dan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

- i. Menjadi narasumber dalam rangka pembelajaran lingkungan hidup.
- j. Memberi dukungan untuk meningkatkan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup¹⁷.

5. Pengelolaan Sarana Pendukung Ramah Lingkungan

Sarana pendukung sekolah merupakan elemen penting yang menunjang terciptanya penyelenggaraan pendidikan yang baik dan efektif, meliputi air yang selalu tersedia di dalam toilet, tempat untuk wudhu, kamar mandi, laboratorium, kantin sekolah, dapur sekolah. Sarana untuk pendukung lingkungan harus dijaga, dikelola dan dipergunakan secara efisien dan efektif agar tidak terjadi kesia-siaan atau pemborosan yang pada akhirnya menimbulkan kerugian pihak sekolah dan alam lingkungan sekolah.

Indikator pengelolaan sarana pendukung sekolah tercantum dalam buku panduan Adiwiyata 2013 Kementerian Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut;

- a. Menyediakan sarana dan prasarana untuk mengatasi permasalahan lingkungan hidup di sekolah
- b. Menyediakan sarana prasarana untuk mendukung pembelajaran lingkungan hidup di sekolah
- c. Memelihara sarana dan prasarana sekolah yang ramah lingkungan
- d. Meningkatkan pengelolaan dan pemeliharaan fasilitas sanitasi sekolah

¹⁷Ibid.

- e. Memanfaatkan listrik, air dan ATK secara efisien
- f. Meningkatkan kualitas pelayanan kantin sehat dan ramah lingkungan¹⁸.

6. Langkah- Langkah Untuk Mewujudkan Program Adiwiyata

Terlampir dalam buku panduan Adiwiyata 2013, penjelasan mengenai langkah-langkah strategis yang digunakan sebagai panduan dalam mewujudkan Adiwiyata, sebagai berikut:

- a. Langkah awal yang harus dilakukan adalah membentuk Tim Adiwiyata Sekolah. Fungsi Tim Adiwiyata adalah untuk merumuskan kajian dan mengkoordinir aksi peuli lingkungan di sekolah.

Susunan Tim Adiwiyata Sekolah terdiri dari unsur Kepala sekolah, komite sekolah, guru, tenaga kependidikan (tata usaha), siswa, orang tua siswa, unsur pemerintahan (kelurahan, kecamatan setempat) perguruan tinggi, masyarakat sekitar termasuk di dalamnya adalah lembaga swadaya masyarakat yang terkait dengan pengelolaan¹⁹.

¹⁸Ibid., hlm 27.

¹⁹Ibid.

Gambaran teknis untuk struktur tim Adiwiyata sekolah dapat dijabarkan pada bagan dibawah:



Gambar. 2. 2. Struktur Tim Adiwiyata Sekolah

b. Menyusun Kajian Lingkungan Sekolah

Langkah ini dilakukan untuk memberikan arah yang jelas terhadap pelaksanaan program Adiwiyata. Cara yang dapat dilakukan untuk menyusun kajian lingkungan adalah sebagai berikut:

- 1) Tim Adiwiyata harus bisa memastikan bahwa keseluruhan anggota tim bisa bekerja sama dengan sebaik-baiknya untuk melakukan kajian, dikondisikan sebanyak mungkin siswa berperan aktif pada proses ini. Untuk mempermudah kajian lingkungan, tim dapat membuat checklist yang di dalamnya memuat masalah-masalah di lingkungan sekolah, misalnya sampah, energi, air, dan kantin

sekolah. Persoalan lain yang dapat dimasukkan dalam checklist adalah keanekaragaman hayati di lingkungan sekolah

- 2) Berdasarkan adanya isu-isu lingkungan yang berkembang, sekolah dapat memilah dan memfokuskan pada satu tau beberapa isu yang akan ditetapkan sebagai fokus utama dalam melaksanakan aksi nyata kepedulian lingkungan
- 3) Untuk mempermudah kerja Tim Adiwiyata sekolah dan agar hasil dari kajian terukur, pelaksanaan kajian dapat dilakukan pada periode tertentu sesuai dengan kondisi dan situasi yang ada. Sebagai contoh dilakukan setiap semester, atau tahunan atau dua tahun sekali. Hal tersebut dilakukan untuk melakukan penilaian dan mengukur serta mengevaluasi kinerja tim Adiwiyata sekolah²⁰.

7. Pelaksanaan Aksi Lingkungan

Penerapan aktifitas aksi lingkungan merujuk pada 4 (empat) komponen dalam program Adiwiyata, yaitu pelaksanaan aksi lingkungan pada komponen kebijakan sekolah, kurikulum yang ada, kegiatan yang bersifat partisipatif, dan sarana prasarana pendukung.

Dalam pelaksanaan program Adiwiyata, semua aksi lingkungan dan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan Adiwiyata harus terdokumentasi, karena ini sebagai bukti otentik yang sah. Contoh, daftar hadir, bukti perencanaan program, berita acara, silabus, dokumen

²⁰Ibid.

kerjasama, dokumentasi kegiatan siswa, pamphlet, photo, rencana pembelajaran, dan lain sebagainya.

8. Monitoring dan Evaluasi

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi menjadi hal yang wajib untuk dilaksanakan dalam tahapan langkah-langkah mewujudkan program Adiwiyata. Dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan kegiatan/program tersebut berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sehingga dengan pelaksanaan evaluasi dan monitoring tersebut dapat ditentukan arah tindakan yang perlu diambil untuk kelangsungan program. Monitoring dan evaluasi harus dilakukan secara terus menerus dan kontinyu.

C. PERAN GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI) DALAM MENGEMBANGKAN KARAKTER PEDULI LINGKUNGAN

1. Pengertian Pendidikan Agama Islam

Pendidikan berasal dari bahasa Yunani yaitu terdiri dari kata “*pais*” artinya seseorang, dan “*again*” diterjemahkan membimbing²¹. Jadi pendidikan (*paedagogie*) adalah bimbingan yang diberikan pada seseorang.

Zuhairini, menyatakan secara umum pendidikan merupakan bimbingan secara sadar oleh pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani peserta didik menuju terbentuknya kepribadian yang utama. sehingga pendidikan dipandang merupakan salah satu aspek yang memiliki

²¹Abu Ahmadi dan Nur Uhbiyati, *Ilmu Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta:1991), hlm. 69.

peran pokok membentuk generasi muda yang memiliki kepribadian yang utama²².

Sedangkan didalam islam istilah yang sekarang berkembang adalah *tarbiyah*²³. Istilah tarbiyah mengacu dari kata tiga kata yaitu *raba yarbu* yang artinya bertambah dan tumbuh, *rabiya yarba* yang berarti tumbuh dan berkembang dan *rabba yarubba* yang berarti memperbaiki, menguasai, memimpin, menjaga, dan memelihara.

Pengertian Pendidikan Agama Islam jika ditinjau secara definitive telah dikemukakan para ahli dalam beberapa rumusan, antara lain:

- a. Zuhairini, Pendidikan Agama Islam adalah usaha sadar untuk membimbing ke arah pembentukan kepribadian peserta didik secara sistematis dan pragmatis, supaya hidup sesuai dengan ajaran islam, sehingga terjadi kebahagiaan dunia akhirat.
- b. Menghayati, mengamalkan ajaran islam melalui kegiatan, bimbingan, pengajaran dan latihan dengan memperhatikan tuntunan untuk menghormati agama islam dalam hubungan kerukunan antar umat beragama dalam masyarakat untuk mewujudkan persatuan nasional.
- c. Tayar Yusuf mendefinisikan Pendidikan Agama Islam sebagai usaha sadar generasi tua untuk menularkan pengalaman, pengetahuan, kecakapan serta keterampilan kepada generasi muda supaya menjadi manusia bertakwa kepada Allah.

²²Zuhairini, *Metodologi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam*, (Malang: UIN Press, 2004), hlm.1.

²³Hery Nur Aly, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Logos, 1999), hlm. 3.

Dari beberapa definisi yang telah dikemukakan dapat unsur yang merupakan karakteristik Pendidikan Agama Islam adalah:

- a. Bentuk pengajaran Pendidikan Agama Islam berupa bimbingan, latihan, pengajaran dari seorang pendidik kepada peserta didik.
- b. Proses pemberiannya dilakukan secara sistematis, bertahap dan kontinyu sesuai dengan perkembangan peserta didik.
- c. Tujuannya adalah peserta didik menjadi seseorang yang berpola hidup yang dijiwai oleh nilai-nilai Islam.
- d. Dilakukan proses evaluasi.

Pendidikan agama menyangkut manusia seutuhnya atau bersifat komprehensif, tidak hanya membekali anak dengan pengertian agama atau mengembangkan intelek anak saja, tetapi menyangkut keseluruhan pribadi anak, mulai dari latihan amalan sehari-hari yang sesuai ajaran agama, baik yang menyangkut hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, maupun manusia dengan dirinya sendiri²⁴.

2. Definisi Guru Pendidikan Agama Islam

Kata guru merujuk pada seseorang yang mempunyai ilmu atau keahlian tertentu.²⁵ Ada dua pandangan tentang definisi guru yaitu *pertama*, pandangan tradisional guru adalah seseorang yang berdiri didepan kelas. *Kedua*, guru adalah seseorang yang mampu membuat orang lain tau

²⁴Zakiyyah Drajat, *Ilmu Jiwa Agama* (Jakarta: Bulan Bintang, 2005), hlm.124.

²⁵Euis Kartika, *Peran Guru PAI dalam Pengembangan Suasana Religius di Sekolah*, hlm.

terhadap sesuatu yang bermanfaat baginya dalam menjalani kehidupan ini²⁶.

Dalam bahasa arab guru berarti muallim dan dalam bahasa inggris artinya teacher dimana mempunyai arti orang yang mempunyai kesempatan untuk mengajar orang lain²⁷. Jadi guru adalah seorang yang mempunyai kemampuan tertentu yang mengabdikan hidupnya untuk memberi pengetahuan kepada orang lain.

3. Peran Guru Pendidikan Agama Islam (PAI)

Guru pendidikan agama Islam mempunyai tanggung jawab yang sangat luar biasa dimana bukan hanya sekedar sebagai memberi mengajar tetapi juga sebagai suri tauladan yang harus konsisten. Guru Pendidikan Agama Islam disamping mengajar juga sebagai orang tua bagi seluruh peserta didik. Ini semua dilakukan karena bentuk tanggung jawab yang merupakan konsekuensi logis dari sebuah amanah yang yang diberikan kepadanya²⁸.

Pembelajaran yang dilakukan oleh guru harus mengupayakan:

- a. membangkitkan minat peserta didik dalam belajar
- b. menumbuhkan sikap yang baik dan mengatur proses pembelajaran serta memberikan pengalaman- pengalaman kepada peserta didik

²⁶Roestiyah, N.K., *Strategi Belajar Mengajar*, (Jakarta: PT. Bina Aksara, 2007), hlm. 176.

²⁷Muhibbin Syah, *Psikologi Pendidikan dengan pendekatan Baru*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010), hlm. 222.

²⁸Novan Ardi Wiyani, Barnawi, *Ilmu Pendidikan Islam: Rancang Bangun Pendidikan Monokotomik-Holistik*, (Jogjakarta: Ar Ruzz Media, 2012,) hlm. 97.

- c. meningkatkan gairah belajar peserta didik
- d. memahami hubungan sosial kemasyarakatan²⁹.

4. Pendidikan Agama Islam Berwawasan Lingkungan

- a. Kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) berwawasan lingkungan

Kurikulum adalah seperangkat program sekolah yang meliputi seluruh mata pelajaran yang ada disekolah tersebut. Kurikulum merupakan garis besar pengajaran yang harus dilakukan oleh masing-masing guru mata pelajaran.

Kurikulum Pendidikan Agama Islam berwawasan lingkungan didasarkan atas azas-azas berikut: *pertama*, tujuan kurikulum, tujuan kurikulum disesuaikan dengan tujuan yang ada dalam program adiwiyata. Berbicara soal nilai- nilai ideal yang Islami berarti berbicara tentang merealisasikan idealitas yang Islami tersebut. Sedangkan idealitas Islami itu sendiri mengandung maksud menyadari bahwa semua perilaku manusia adalah atas dasar kuasa Allah SWT, serta meyakini Allah SWT maha kuasa atas segala sesuatu. *Kedua*, asas keterpaduan, Kurikulum Pendidikan Agama Islam merupakan perpaduan dari semua disiplin ilmu yang dikombinasikan dengan keadaan sekolah dan masyarakat³⁰.

²⁹Heri Jauhari Muchtar, *Fikih Pendidikan ...*, hlm.153.

³⁰Laily Atiqoh dan Budiyono Saputro, *Kurikulum Pendidikan Agama Islam Berbasis Lingkungan sebagai Penguatan Pendidikan Humanistik di Sekolah Adiwiyata*, Edukasi: Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 12 No.2, 2017, hlm. 293.

b. Pelestarian lingkungan dalam Pendidikan Agama Islam

Konteks amar makmur nahi munkar juga diperlukan dalam hal pelestarian lingkungan dalam arti kita menolak bahkan mngecam keras aksi perusakan terhadap lingkungan. Sebagaimana firman Alloh SWT dalam surat An Nisa' ayat 114, Al A'rof ayat 119 dan surat Luqman ayat 27 dimana larangan untuk mengexploitasi dan merusak lingkungan hanya untuk kemaslahatan umat di ala ini.

Hal-hal yang merupakan kategori merusak lingkungan adalah penggundulan hutan, membuang sampah sembarangan, polusi udara, perbuatan maksiat yang mengakibatkan penyakit social. Langkah-langkah yang bisa diambil untuk menyelamatkan lingkungan sebagai berikut:

- 1) Tidak berlebihan dalam menebang hutan
- 2) Memanfaatkan sampah dan limbah industri menjadi sesuatu yang bermanfaat
- 3) Mengurangi segala kegiatan yang dapat mencemari udara
- 4) Menegakkan amar makruf bahi munkar dengan menegakkan ajaran agama Islam³¹.

c. Metode pembelajaran lingkungan hidup dalam Pendidikan Agama Islam

Metode pembelajaran mempunyai peranan penting didalam proses belajar mengajar peserta didik. Pembelajaran lingkungan dalam

³¹M. Muhtarom Ilyas, *Lingkungan Hidup Dalam Islam*, Jsh Jurnal Sosial Humaniora, vol. 1 No. 2 , 2008, hal. 158-160.

Pendidikan Agama Islam dapat dilaksanakan dengan beberapa cara yaitu:

- 1) Membawa peserta didik kedalam lingkungan masyarakat sebagai proses pembelajaran
- 2) Membawa sumber-sumber dari masyarakat kedalam kelas sebagai contoh yang real.

Ada beberapa metode pembelajaran lingkungan dalam PAI agar karakter peduli lingkungan tumbuh pada peserta didik sebagai berikut:

- 1) Metode pembiasaan

Pembiasaan dapat memudahkan siswa menangkap apa yang diajarkan, hal ini tidak hanya berhubungan dengan lahiriyah tapi juga batiniah dan juga metode yang sangat ampuh dalam mengajar peserta didik karena akan selalu teringat.

- 2) Metode keteladanan

Metode ini banyak keuntungannya dimana memudahkan peserta didik dalam menerapkan disiplin ilmu, memudahkan guru dalam memberikan evaluasi hasil belajar, terciptanya lingkungan sekolah yang baik serta merangsang guru untuk selalu konsisten dalam memberikan keteladanan.

- 3) Metode pemberian ganjaran

Pemberian ganjaran bisa dilakukan kepada peserta didik yang berperilaku baik. Pemberian ganjaran ini bisa berupa mendoakan, memberikan penghargaan, memberi imbalan dan lain-lain.

4) Metode pemberian hukuman

Metode ini sebagai langkah paling akhir yang di gunakan untuk memberikan efek jera.

5. Konsep Lingkungan Hidup Menurut Agama Islam

a. Hubungan manusia dan lingkungan

Islam adalah agama yang paling sempurna, yang di dalamnya tidak saja mengatur hubungan dengan Sang Pencipta, namun juga mengatur bagaimana menjaga hubungan dengan makhluk ciptaannya. Salah satunya adalah mengatur hubungan dengan lingkungan (alam). Sebagai agama pembawa rahmat bagi alam semesta, islam sangat memperhatikan bagaimana pentingnya lingkungan dalam kelangsungan kehidupan dunia. Dan menjadi kewajiban manusialah sebagai untuk menjaga lingkungan.

Manusia sebagai kholifah di muka bumi mempunyai kewajiban untuk membuat perdamaian dan keamanan dengan alam. Yang artinya manusia mempunyai kewajiban untuk memakmurkan alam. Artinya memakmurkan adalah manusi diberi hak untuk memanfaatkan alam sesuai, selaras dengan sifat dan kondisi dari alam tersebut tanpa melakukan kerusakan.

Ini berarti pemeluk agama Islam yang disebut muslim, harus mengetahui dan memahami ajaran islam mengenai lingkungan. Dengan mengetahui dan memahami ajaran tersebut seorang muslim harus menjaga lingkungan sebagai salah satu bentuk ketaatan pada

perintah Allah. Menjaga lingkungan dalam islam sebagai salah satu bentuk perintah, yang apabila diabaikan Allah sendiri telah memperingatkan akan timbulnya bencana.

Manusia dan lingkungan merupakan satu kesatuan yang mempunyai hubungan timbal balik. Bagaimana manusia dipengaruhi oleh lingkungannya atau sebaliknya bagaimana manusia mempengaruhi lingkungannya adalah bentuk timbal baliknya hubungan manusia dan lingkungan.

Manusia dan lingkungan adalah dua komponen yang saling membutuhkan. Untuk menjaga keberlangsungan hidupnya manusia memerlukan lingkungan, sebaliknya bagaimana lingkungan akan terbentuk manusialah yang menentukannya. Hubungan manusia dengan lingkungan meliputi:

- 1) Al I'tibar (mengambil pelajaran, berfikir serta mensyukuri alam ciptaan Allah SWT)
- 2) Al Intifa' (mengambil manfaat serta mengexploresinya dengan baik)
- 3) Al Ishlah (memelihara dan melestarikan untuk kemaslahatan manusia)

b. Etika Lingkungan dalam Islam

Prinsip dasar etika lingkungan dalam Islam yang mendasari spiritualitas seorang muslim ada enam antara lain prinsip Tauhid (keesaan Allah SWT), prinsip Ayat (prinsip tanda keberadaan

AllohSWT), prinsip kholifah (perwakilan/ penjaga), prinsip mizan (keseimbangan), prinsip amanah (kepercayaan), prinsip hisab (akuntabilitas).

1) Prinsip tauhid

Prinsip ini adalah prinsip dimana semua yang ada di alam ini merupakan ciptaan dari sesuatu yang Esa. Oleh karena itu sebagai makhluk kita di haruskan hanya percaya kepada yang maha esa. Al Quran – 4 : 126 Alloh SWT bwefirman *“kepunyaan Alloh lah apa-apa yang ada dilangit dan dibumi dan adalah (pengetahuan) meliputi segala sesuatu”*

2) Prinsip ayat

Prinsip ini memberikan arti bahwa semua bentuk di alam ini merupakan perwujudan adanya Alloh SWT.

3) Prinsip mizan

Dalam prinsip mizan ini kita sebagai manusia harus mempercayai bahwa apa saja yang Alloh SWT ciptakan semuanya dalam bentuk dan keseimbangan yang sempurna. Sebagaimana dalam (Al Quran- 54: 49) yang intinya bahwa sebagai makhluk kita dlarang merusak kesimbangan tersebut.

4) Prinsip kholifah

Dalam (Al-Quran – 2: 20) yang artinya *“sesungguhnya Aku hendak menjadikan kholifah dibumi”*. Kata kholifah dalam hal ini

berarti penjaga yang artinya sebagai manusia harus menjaga apa saja yang sudah dikaruniakan Allah SWT.

5) Prinsip amanah

Sebagai manusia yang diamanahi Allah SWT harus menjaga titipan dengan mengelola dan memanfaatkan dengan baik. sebagaimana Allah SWT berfirman dalam (Al Quran – 45: 12-13) yang artinya *Allah lah yang menundukkan lautan untukmu supaya kamu dapat mencari karuniaNya dan mudah-mudahan kamu bersyukur, dan dia telah menundukkan apa –apa yang ada dilangit dan dibumi semuanya sebagai rahmat, sesungguhnya pada yang demikian itu ada tanda kekuasaanNya bagi yang berfikir.*

6) Prinsip hisab (akuntabilitas)

Prinsip ini memahami bahwa setiap perbuatan manusia tidak lepas dari perhitungan Allah SWT. Sebagaimana firman Allah SWT dalam (AL Quran – 99: 7-8) yang artinya *“barang siapa mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun niscaya dia akan melihat (balasannya) dan barang siapa melakukan kejahatan sebesar dzarrahpun dia akan melihat (balasannya)”*³².

c. Pelestarian Lingkungan Hidup

Kerusakan lingkungan harus segera diatasi. Langkah-langkah yang dapat dilakukan adalah selain dengan cara merubah cara pandang

³²Zumrodi Maszoom, *Etika Lingkungan dalam Islam*, Academia.edu. 2015, hlm. 5-8.

perlu di lakukan juga tindakan pelestarian alam. Adapun tindakan tersebut antara lain:

1) Gerakan Pelestarian Lingkungan hidup

Tema gerakan pelestarian lingkungan pada abad ini sangat diperlukan dimana semenjak era industri yang hamper segala kebutuhan hidup manusia tidak lepas dari yang namanya produk industry yang ternyata sekarang terasa tidak bersahabat dengan alam dan manusia. Ini disebabkan karena penggunaan bahan kimia yang menimbulkan kerusakan terhadap alam dan manusia. Dampak dari kerusakan seperti banjir, tanah longsor, erosi, tsunami dan lain sebagainya yang bahkan sering merenggut korban jiwa.

Gerakan pelestarian lingkungan dapat dilaksanakan dalam bentuk memberi pengertian kepada masyarakat terkait dengan bahaya penggunaan bahan-bahan kimia, melakukan sosialisasi penggunaan bahan-bahan organik kepada masyarakat.

2) Pelestarian Lingkungan dalam Islam

Konsep Islam dalam pelestarian lingkungan sangat jelas dan tegas mengingat hubungan alam dan ALloh sangat erat karena alam merupakan ciptaan Allah SWT. Artinya menjaga dan melestarikan alam berarti menjaga ciptaan Allah SWT yang artinya akan dinilai ibadah. Bentuk menjaga dan melestarikan alam dapat diimplementasikan dengan menjaga agar udara tetap bersih, memelihara dan menyayangi binatang, merawat tanaman dengan

menyiraminya dimusim kemarau, menjaga kebersihan sungai dengan tidak membuang kotoran dan sampah disungai, menjaga tanah agar tetap subur. Dari sini dapat disimpulkan bahwa menjaga dan melestarikan alam/lingkungan didasarkan pada kepatuhan kepada Allah SWT.

D. Kajian Penelitian yang Relevan

Dalam penelitian ini Penulis menyadari bahwa penelitian ini bukanlah penelitian yang mengangkat permasalahan baru dalam dunia pendidikan. Ada banyak penelitian-penelitian yang mengangkat tema besar yang sama yaitu adiwiyata dan peduli lingkungan diantaranya:

1. Tesis yang ditulis oleh Ellen Landriany, seorang mahasiswa program studi magister kebijakan dan pengembangan pendidikan, Universitas Muhammadiyah Malang dengan judul tesis “ Implementasi Kebijakan Dalam Upaya Mewujudkan Pendidikan Lingkungan Hidup Pada Sekolah Menengah Umum (SMA) Kota Malang”. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa Implementasi kebijakan yang diterapkan berdampak positif terhadap pelestarian lingkungan. Persamaan dengan penelitian ini adalah kesamaan dalam konteks adiwiyata dan perbedaanya mengenai tempat penelitian serta di penelitian ini mengangkat perspektif Islam dalam menganalisa pelaksanaan sekolah berwawasan lingkungan.
2. Tesis yang ditulis oleh Akhmad Yusron, S.Pd.I, mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun

2016 dengan judul tesis “ Implementasi Pendidikan Karakter Anak Melalui Program Adiwiyata di SDN Giwangan, Umbulharjo, Yogyakarta”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peranan guru dalam pembentukan karakter anak yang mempunyai kesadaran untuk memelihara lingkungan sangat penting. Keberhasilan dari nilai karakter yang peduli terhadap lingkungan merupakan indikator pencapaian keberhasilan program Adiwiyata di sekolah. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama dalam konteks adiwiyata, perbedaannya dengan penelitian ini terkait tempat penelitian serta didalam penelitian ini menggunakan perspektif Islam dalam menganalisa pelaksanaan sekolah berwawasan lingkungan sedangkan di penelitian terkait mengangkat objek bahasan anak.

